

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam mengatur pengelolaan keuangan melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan

pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

Terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Wujud nyata apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 358 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan 3.397 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.551 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 5,28 triliun.

Hasil audit BPK atas LKPD pada pemerintah kabupaten Bangka pada tahun 2018 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian namun, terdapat 14 temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintahan Bangka. Sembilan di antaranya terkait sistem pengendalian internal, dan lima sisanya menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 408,11 juta. Satu di antara temuan adalah realisasi dan beban perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Bangka, dimana tak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp 328 juta (BangkaPos.com)

Hal ini terbukti masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai dan

Standar Akuntansi Pemerintah yang belum diterapkan secara optimal (*bpk.go.id-IHPS 1 tahun 2011*).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah belum sepenuhnya untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa aja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketetapan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan adalah Putra (2017) pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi, Efendi dan Darwanis (2017) dalam penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Agung dan Gayatri (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, Inasari (2018) Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini (kompetensi SDM, penerapan SPI, penerapan SAP, penerapan SAKD, dan peran auditor internal) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa hanya variabel kompetensi SDM, penerapan SAP, dan penerapan SAKD yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel penerapan SPI, dan peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Mulia (2018) berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal terhadap laporan keuangan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikan yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian ini menarik untuk meneliti kembali faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Standar Akuntansi Publik (SAP) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisa pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisa pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk memberikan hasil empiris dan menganalisa pengaruh Standar Akuntansi Publik (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan

dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pengaruh faktor kualitatif.
3. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh SDM, SPI, dan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab I**

Merupakan bagian pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

- **Bab II**

Merupakan bagian tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

- **Bab III**

Membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, metode pengambilan

sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

- **Bab IV**

Merupakan bagian pembahasan yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dan pengujian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku

- **Bab V**

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

